

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
INFORMASI KEUANGAN DI
PROVINSI SUL-SEL**

SKRIPSI

Oleh
PATMAWATI
NIM 105730475414



Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
INFORMASI KEUANGAN DI
PROVINSI SUL-SEL**

SKRIPSI

**Oleh
PATMAWATI
NIM 105730475414**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah saya Sahir dan Ibu saya Junira yang senantiasa memberi semangat, dan mendoakan saya hingga detik ini dan telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Saudara saya yang selalu mengingatkan dan mendukung saya baik berupa materi dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
3. Dosen-dosen, terutama Dosen Pembimbing Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan Saida Said, SE.,M.AK yang selalu membimbing, membantu dan tak pernah lelah.
4. Para sahabatku serta teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu secara rinci yang senantiasa menjadi penyemangatu serta penebar tawa dalam hari-hari yang lalu.

MOTTO HIDUP

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa...
Selalu ada ada jalan bagi mereka yang sering berusaha..



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel"
Nama Mahasiswa : Patmawati
No. Stambuk/NIM : 105730475414
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

Makassar, 13 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM: 497794


Saida Said, SE., M.AK
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 978


Ismail Badollahi, S.E.M.Si.Ak., CA.
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **PATMAWATI**, NIM : **105730475414**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0191/2018 M, Tanggal 04 Shafar 1440 H/ 13 Oktober 2018 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Shafar 1440 H
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM (Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE, MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE,M.Si.Ak.,CA
2. Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
3. Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA
4. Saida Said, SE.,M.Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Ismail Rasulong, S.E.,M.M
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patmawati
Stambuk : 105730475414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Penarapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2018.

Makassar, 13 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba_Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel.”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Sahir dan Ibu yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang serta doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku yang tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah dipanjatkan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA. Ketua Jurusan Akuntansi Univeritas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Ibu Saida Said, SE.,M.AK selaku pembimbing II yang telah berkenan selama dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
7. Seluruh Guru-guru mulai dari jenjang pendidikan SDN 186 Karang, SMPN Satap 5 Baraka dan MAN 1 Baraka Kabupaten Enrekang yang telah rela mengajar, membimbing dan menuntun penulis ke jenjang perguruan tinggi.
8. Teman-teman Akuntansi 2014 dan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini. Teman pejuang toga Risma Sapar, Indriyati, Harianti, Hasnawati.
9. Saudara saya kakak Nur liani, ketiga adik perempuan saya Kurnia dan Hadija serta adik laki-laki saya Nasar, Bayu Dan Mufli.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khaerat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, 2018

PATMAWATI

ABSTRAK

PATMAWATI, (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Mahmud Nuhung Dan Pembimbing II Ibu Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel dependen Kualitas Informasi Keuangan. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden, Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 10 pernyataan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan di Provinsi Sul-Sel.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Kualitas Informasi Keuangan.

ABSTRACT

PATMAWATI, 2014. Effect of Implementation of Government Accounting Standards on Financial Information Quality in South Sulawesi Province.

Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Mahmud Nuhung And Saida Said Advisor.

This study aims to determine the effect of independent variables namely the application of government accounting standards on the dependent variable the quality of financial information. The number of samples in this study was 50 respondents. Data collection was carried out directly using a questionnaire containing 10 statements. This study used a descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the implementation of Standards affect the quality of financial information in the Province of South Sulawesi.

Keywords: Government Accounting Standards (SAP), and Quality of Financial Information.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	8
B. Kualitas Informasi Keuangan.....	13
C. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan	15
D. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	16

E. Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.....	18
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Kerangka Fikir	22
H. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Overasional Variabel.....	25
E. Populasi dan Sampel	26
F. Metode Analisis	27
G. Rancangan Pengujian Hipotesis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Keterbatasan	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Sample Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	41
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden	42
Tabel 4.3	Pendidikan Responden	42
Tabel 4.4	Masa Kerja	43
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	44
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Keuangan (Y)	45
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.8	Hasil Anova	48
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Hipotesis	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1	Badan struktur organisasi Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
Gambar 4.2	Bagan struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Wilayah	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	55
2. Matriks Tabulasi Data	58
3. Olah Data SPSS	59
4. Dokumentasi Penelitian	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencapaian kinerja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui komunikasi dengan rakyat dengan menggunakan komunikasi dua arah hal ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Menurut Apriyono (2010) mengungkapkan bahwa “Pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan good governance”.

Good governance atau pemerintahan yang baik dinilai dengan pemerintahan yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sehingga pemerintah dalam mewujudkan good governance tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah, memerlukan suatu aturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Menurut Renyowijoyo (2008: 171) menyatakan bahwa:

”Perubahan pada bidang keuangan negara ini telah menimbulkan reformasi disegala bidang sebagai bentuk dukungan agar perubahan tersebut dapat terlaksana dengan baik”. Reformasi keuangan ini juga

didalamnya mengatur mengenai akuntansi pemerintahan karena untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya melalui proses akuntansi tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas perlu adanya standar akuntansi pemerintah.”

Sedangkan Yujana (1998), mengungkapkan bahwa “Adanya perubahan akuntansi pemerintahan yang awalnya pembukuan akuntansi pemerintah menggunakan cara akuntansi tradisional berbasis kas dengan pencatatan single entry menuju akuntansi modern”. Akuntansi basis kas memiliki keuntungan yakni pencatatannya yang sederhana. Akan tetapi akuntansi berbasis kas ini juga memiliki beberapa kekurangan yakni, akuntansi berbasis kas kurang informatif karena informasi yang dihasilkan mengenai saldo kas, penerimaan, pengeluaran dan informasi yang diberikan mengenai harta, hutang dan kewajiban yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reformasi di dalam penerapan akuntansi pemerintahan hal ini diperlukan agar keuangan pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang bersifat informatif. Salah satu cara yakni dengan mewajibkan pencatatan keuangan pada setiap instansi pemerintahan berbasis akrual, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 yakni pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun, Sehingga pada tahun 2010 tepatnya pada bulan Oktober pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” (Abdullah, 2010).

Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan terpenting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek

dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik Negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasi dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sulitnya menjalankan penegakan hukum, monopoli dalam kegiatan publik yang kualitasnya memburuk.

Penelitian Permana (2011) dengan Judul Pengaruh Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas (Survei Pada Dinas Kota Bandung). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di dinas Kota Bandung. Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas pemerintah Kota Bandung.

Batubara (2006) menyimpulkan bahwa penerapan good governance merupakan tuntutan dari pembaharuan system keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2012, 18) konsep "governance" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tapi juga peran berbagai

actor di luar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan sector pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam Nisjar (2011:119) mengatakan bahwa governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (2010) berpendapat bahwa Good Governance, memiliki kriteria yang berkemampuan transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2009, 1) mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Sedangkan untuk mencapai pengelolaan keuangan perlu adanya pemerintahan yang partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan atau pemerintahan yang good governance. Apalagi dengan adanya undang-undang No.9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi

Good Governance di sini, dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan oknum yang membuat kesalahan, penyimpangan atau penyelewengan atas penggunaan keuangan kemudian memberikan sanksi, melainkan tersedianya keuangan yang cukup, memelihara segala fasilitas yang berkaitan dengan keuangan serta menjamin agar pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan terlaksana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain Good Governance dalam pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk menjamin supaya sumber-sumber dan penggunaan keuangan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Good governance pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujud menjadi kenyataan.

Di Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan masalah Good Governance sangat diutamakan dalam terbentuknya tata pemerintahan yang jauh dari tindakan korupsi, kolusi, dan neotisme khususnya dalam Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Asset Daerah yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan keuangan. Usaha membangun daerah yang semakin meningkat merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah sebagai perwujudan dari kegiatan menuju otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, uraian dan beberapa penelitian yang telah dijelaskan peneliti menarik kesimpulan bahwa peneliti mengetahui lebih jauh tentang pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Pendapatan Provinsi sul-Sel sebagai acuan dalam menyelesaikan laporan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel?
2. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, penulis jabarkan berdasar pada sasaran dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Provinsi Sul-Sel.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Bagi bidang ilmu ekonomi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi jurusan akuntansi yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan. Dan bagi pembaca, menambah wawasan agar bisa mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan pada badan pendapatan daerah provinsi sul-sel.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis,realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan dan ekuitas. Dalam hal peraturan

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur

Kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

B. Kualitas Informasi Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila

entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

C. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai konsistensi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Laporan Keuangan menurut Harahap (2009 : 105) adalah :”laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Sundjaja dan Barlian (2008 : 25) mendefinisikan laporan keuangan sebagai :”suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi

yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan”.

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut Munawir (2004 :2) adalah : ”laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan aktivitas suatu perusahaan”.

Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

D. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Suatu system dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Robert & Vijay (2005:174) dikatakan bahwa “efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas diperlukan suatu system pengendalian intern yang baik. Dalam

lingkungan pemerintahan Sistem pengendalian Intern disebut SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008, pasal 1 no.2).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008, pasal 1 no.1).

Menurut Moeller dan Robert (2009:33), terdapat lima komponen pengendalian internal baik untuk pengendalian intern pemerintah maupun perusahaan bisnis:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian resiko;
3. Aktifitas pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan.

E. Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu menurut pendapat Deddi Nordiawan dalam Irvan Permana (2011:33) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Indrawati (2012). "Prinsip Good Financial Governance dalam pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan clean governance" hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan Negara yang bertumpu pada tatanan good governance adalah pengelolaan keuangan yang bernuansa solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan secara partisipatif.

Mia Oktariana, dkk (2016). "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang". Berdasarkan hasil dari pengujian secara statistic memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0.001 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan.

Titiek Puji Astuti & Yulianto (2016). "Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya undang-undang no. 6 tahun 2014". Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Batubara (2006) menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan system keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik

(*public accountability*) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tua. S Manuppan Bangun, dkk (2015). "Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)". Berdasarkan penelitian ini secara keseluruhan adalah 0.771 yang memperhatikan bahwa 77,1% kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dan sisanya 22.9% oleh variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur.

Ni Made Asih Ristanti, dkk (2014). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)". Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan pertama, system pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan. Kedua, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan.

Ritno H. Rondonuwu, dkk (2015). "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa". Hasil penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga dinas yang sebelumnya dalam lingkup Dinas Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan setelah merger tahun 2008

menurut peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 63 Tahun 2008, dan kembali dipisahkan tahun 2014 dengan peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 5 Tahun 2014.

Suhadak, dkk (2015). "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)". Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance yang terdiri dari kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE).

Febriana F. Albugis (2016). "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Hasil pembahasan penelitian ini adalah salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Intihanah & Nur Afifa Muthia S (2017). "Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari)". Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Melina marcori ludani, dkk (2017). "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)". Hasil penelitian ini akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai bagus. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara berturut-turut mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jadi dalam akuntansi WTP itu sudah yang paling baik dalam system Pengelolaan Keuangan.

G. Kerangka Fikir

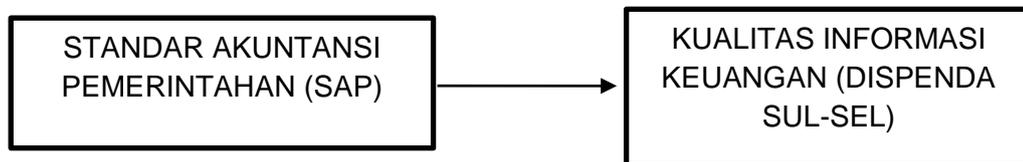
Penelitian ini melalui kerangka pemikirannya pada masalah pokok dalam pengelolaan keuangan. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Penganalisaan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pada akhir dari penelitian ini dapat kesimpulan serta implikasi manajerialnya yang dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil kegiatan penelitian serta beberapa masukan kepada pihak Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan yang dijalankan agar lebih baik lagi.

Untuk lebih jelasnya kerangka fikir penulis uraikan dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar : 2.1
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengajukan hipotesis yang dihadapi perusahaan sebagai berikut :

Diduga bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka melakukan penelitian ini maka waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait pada judul penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu Maret hingga Bulan Mei 2018.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari kantor berdasarkan hasil pengamatan dengan sub keuangan dan beberapa staf yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan yang diteliti, berupa laporan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka, skala-skala, table-tabel, formula dan sebagainya yang sedikit banyak menggunakan matematika, sedangkan data kualitatif berupa data yang tidak dapat diukur dengan angka ataupun ukuran lain yang sifatnya eksak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini, maka digunakan metode penelitian studi kasus (Case study method) dan pengumpulan data melalui penelitian, yaitu penelitian lapangan (field research), yaitu data yang diberikan langsung kepada responden dengan menggunakan item-item pertanyaan yang telah dibatasi dalam pemberian jawaban. Untuk setiap pernyataan diberi bobot 1 sampai 5 terhadap tingkat setuju atau ketidaksetujuannya.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana yaitu :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Informasi Keuangan

X = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

e = error

D. Operasional Variabel

Dalam memudahkan melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian maka dibuat operasional variabel. Sugiyono (2011: 31) “Variabel adalah merupakan suatu hal dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tersebut lalu ditarik sebuah kesimpulan”. Adapun variabel yang ada dalam penelitian terdiri atas dua jenis yakni variabel bebas dan variabel terikat:

1. Variabel bebas adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan indikator seluruh standar. Menurut Mardiasmo (2009:148) “Standar

Akuntansi Pemeritahan merupakan acuan atau pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan”.

2. Variabel tak bebas atau variabel terikat (Y) adalah kualitas informasi keuangan dengan indikator laporan keuangan tersebut relevan, andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami. “Menilai sebuah kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi”.(Tanjung, 2008: 10).

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:148) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Keuangan serta staf pelaporan keuangan sebagai responden pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel yang berjumlah kurang lebih 50 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:149) “Sampel bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti”.

Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah populasi pada kantor Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah

sampel dalam penelitian ini ditetapkan peneliti dengan jumlah 50 orang. Dengan menggunakan metode sampling jenuh ialah sampel yang mewakili jumlah populasi. Yang biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.

F. Metode Analisis

1. Deskriptif Kualitatif

Statistik Kualitatif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian untuk permasalahan mengenai cakupan kualitas informasi keuangan. Peneliti akan memberikan penggolongan terhadap jawaban yang diberikan responden.

2. Uji Kualitas Data

- a. **Uji validitas** dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Koefisien validitas menggambarkan tingkat kemampuan instrumen untuk mengungkap data atau informasi dari variabel yang diukur. Teknik pengujian validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* dari *pearson* dengan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor item pernyataan terhadap skor total. Apabila nilai total *pearson correlation* $> 0,3$, maka probabilitas kurang dari 0,05 maka item tersebut valid (Arikuntum, 2002 : 146).
- b. **Uji reliabilitas** bertujuan untuk apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji ini

dilakukan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach alpha* masing-masing instrument. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel bila *Croanbach alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 Sekaran (2003. 257) yang menyatakan bahwa pada umumnya reliabilitas yang nilai r-nya kurang dari 0,6 dikatakan kurang reliabel, antara 0,6 sampai 0,8 adalah cukup reliabel, dan diatas 0,8 suatu instrumen dikatakan baik.

G. Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametric untuk menguji hipotesis (H). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan dengan cara menguji nilai F. Untuk menguji masing-masing variabel independen dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikan (α) 0,05 atau 5%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

- a. Sejarah Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelum tahun 1972, Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (Pajak, Retribusi, dan Pendapatan-Pendapatan Daerah lainnya yang sah) maupun Pendapatan Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan semakin meningkatnya Usaha Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu Tugas Pokok Pemerintah Daerah untuk menuju ke arah Otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah guna membiayai Pembangunan Daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil Dinas Pendapatan Daerah, perlu

dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan Pendapatan Daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. II Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan. Sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

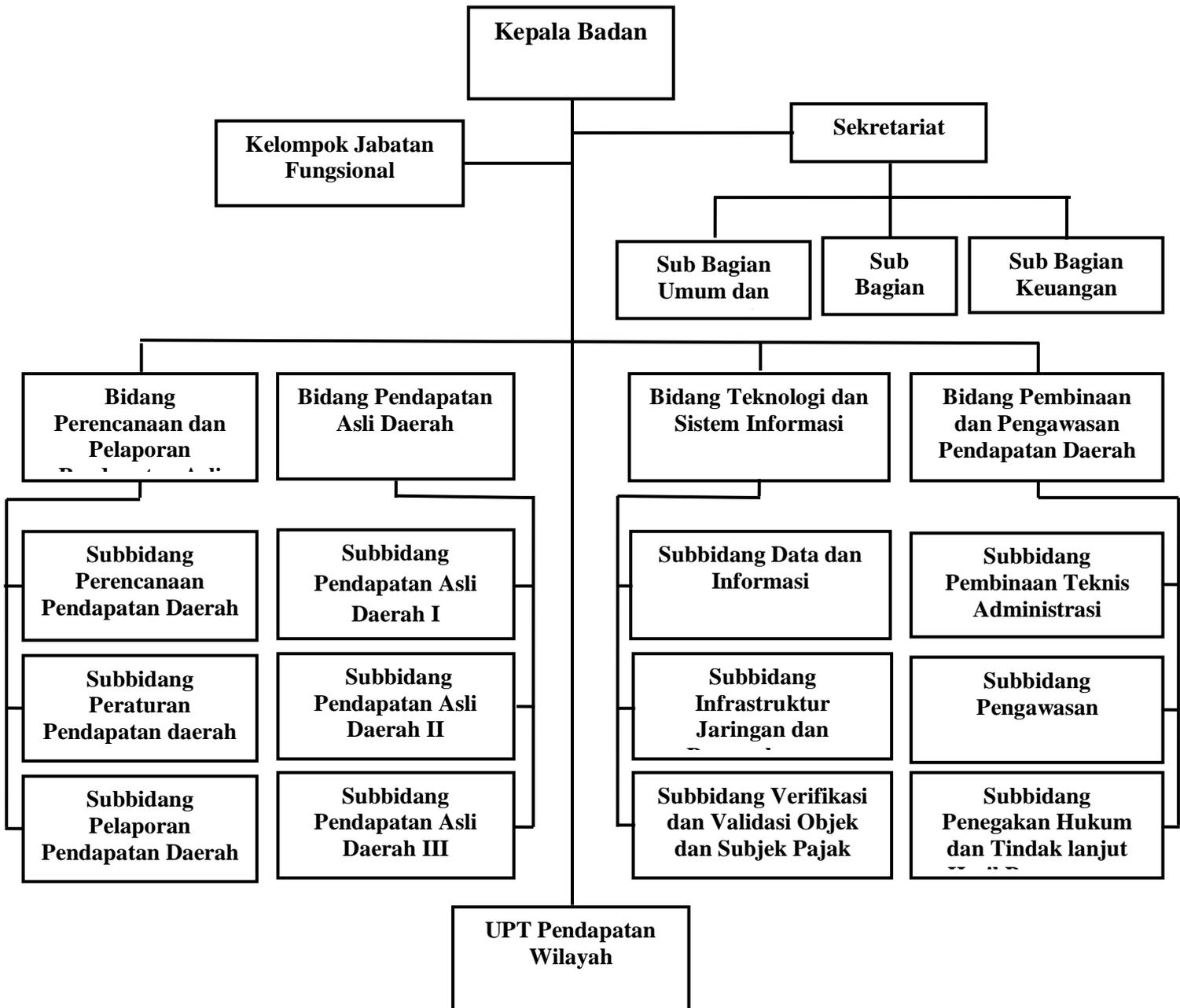
b. Peranan Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah untuk menyusun program, mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja, yaitu; Sekretariat, Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah.

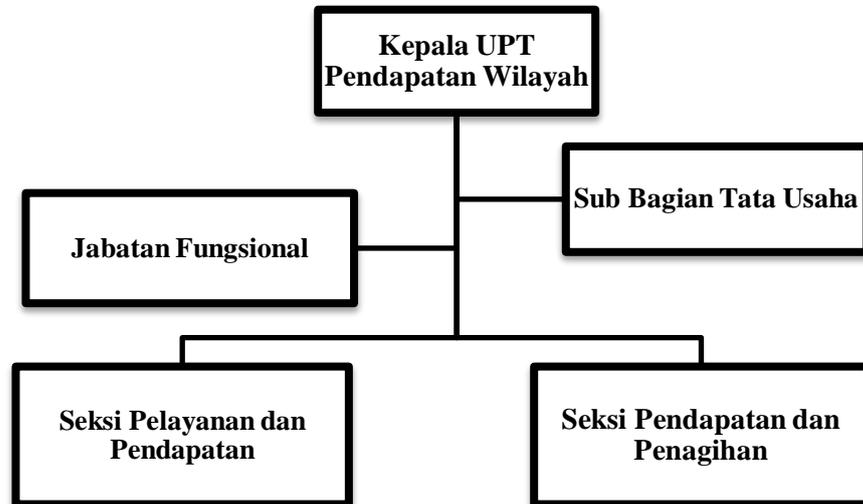
c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Badan struktur organisasi Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;



Gambar 4.2

Bagan struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Wilayah



1. Tugas, fungsi dan kewenangan unit dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah

1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan badan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi

penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

d. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- 1) Bidang Pendapatan asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

1) Bidang Teknologi dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi, sbb :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;
- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

g. Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pengungkapan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah

- 1) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan Wilayah yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, mengawasi pelaksana tugas ketatausahaan, pelayanan dan penetapan pajak, pendapatan dan penagihan pajak serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan wilayah kerja.

d. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu "Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018".

Penetapan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di samping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada tugas pokok badan, yaitu "menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah".

Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : "TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN

DAERAH YANG MAKSIMAL MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN INOVATIF". Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggungjawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah; dan
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang yang transparan dan akuntabel.

B. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Data Penelitian dan Responden

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diberikan langsung kepada responden dalam bentuk kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 58 kuesioner. Namun jumlah yang diterima kembali sebanyak 50 kuesioner. Hal ini disebabkan ada beberapa responden yang tidak berada ditempat semenjak diberikannya kuesioner hingga pengambilan kembali kuesioner selama 1 minggu. Kemudian juga terdapat beberapa kuesioner yang rusak. Berdasarkan hal tersebut, sehingga jumlah kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 50 kuesioner.

Tabel 4.1
Sample dan tingkat pengembalian kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	58
Kuesioner yang kembali	50
Kuesioner yang tidak kembali	8
Kuesioner yang bisa diolah	50
Tingkat pengembalian (<i>Response rate</i>)	81%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 58 kuesioner yang disebarakan yang dapat terkumpul sebanyak 50 buah kuesioner. Tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 81% dari total kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 8 kuesioner atau sebesar 19%. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner yang cukup tinggi

karena peneliti mendatangi langsung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dalam melakukan penyebaran kuesioner.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Persentase
Laki-laki	33	66%
Perempuan	17	34%
Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 33 atau sebesar 66%, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang atau sebesar 34% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya, sebagian besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

Tabel 4.3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	Persentase
S1	46	92%
S2	4	8%
S3	0	0%
Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada responden yang berpendidikan terakhir dengan kategori Sarjana Strata (S1) sebanyak 46 orang atau sebesar 92%, dan Strata Dua (S2) sebanyak 4 orang atau sebesar 8%.

Tabel 4.4
Masa Kerja

Lama Bekerja	Absolut	Persentase
≤ 5 Tahun	36	72%
> 5 Tahun	14	28%
Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan lama kerja adalah diatas 5 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 28% sedangkan sisanya sebanyak 36 orang atau sebesar 72%.

2. Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2001). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan hipotesis H_0 : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk H_a : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis H_0 dan H_a , kemudian uji dengan membandingkan r hitung (tabel *corrected item-total correlation*) dengan r tabel (tabel *Product Moment* dengan dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* (df)

= $n-2$, dimana “n” adalah jumlah sampel penelitian sebanyak 50 responden sehingga diperoleh nilai (df) = $50-2$ atau nilai df dari 48 adalah 0,297. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel (Ghozali, 2001:45). Hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Pernyataan	Variabel	Pearson correlation	r tabel	Kesimpulan
Butir 1	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,419	0,297	Valid
Butir 2	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,426	0,297	Valid
Butir 3	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,413	0,297	Valid
Butir 4	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,513	0,297	Valid
Butir 5	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,388	0,297	Valid

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Keuangan (Y)

Pernyataan	Variabel	Pearson correlation	r tabel	Kesimpulan
Butir 1	Kualitas Informasi Keuangan	0,386	0,297	Valid
Butir 2	Kualitas Informasi Keuangan	0,441	0,297	Valid
Butir 3	Kualitas Informasi Keuangan	0,652	0,297	Valid
Butir 4	Kualitas Informasi Keuangan	0,420	0,297	Valid
Butir 5	Kualitas Informasi Keuangan	0,467	0,297	Valid

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan n 50 (angka 50 karena jumlah responden adalah 50), maka r tabel sebesar 0.297. Hal ini berarti bahwa nilai pearson correlation lebih besar dari nilai r tabel maka semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang diberikan. Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistik *cronbach alpha* dengan signifikan yang di gunakan sebesar 0,6 di mana jika nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih besar dari 0,6 maka butir pernyataan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaiknya, jika nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka butir pernyataan tersebut tidak *reliable*. (Nunnally,1967 dalam Ghozali, 2001:42).

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah butir pernyataan	Cronbach alpha
Standar akuntansi pemerintahan	5 butir	0,677
Kualitas Informasi Keuangan	5 butir	0,712

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah reliable, karena α hitung $>0,6$. Pada variabel Variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki α hitung $> 0,677 > 0,6$. Dan variabel kualitas informasi keuangan memiliki α hitung $0,712 > 0,6$.

4. Hasil pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan struktur model. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 50 responden pada Bapenda, diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X), dan kualitas informasi keuangan (Y). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada hasil analisis regresi dari data.

a. Uji signifikan simultan (Uji F-test)

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas perusahaan atau tidak. Berikut adalah hasil uji statistik:

Tabel 4.8. ANOVA^a

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,100	2	110,050	67,499	,000 ^b
	Residual	30,880	47	,657		
	Total	250,980	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 didapat nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari dari 0,05 artinya model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan di provinsi sul-sel.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji T-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,251	,928		2,426	,019
	X	,262	,085	,295	3,092	,003

Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel pengujian hipotesis dan persamaan regresi berganda, dapat diketahui hasil-hasil penelitian yaitu:

1. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,936 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 93,6%. Artinya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan terhadap kualitas informasi keuangan sebesar 93,6%.
2. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,877 artinya kualitas informasi keuangan sebesar 87,7% dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan sebesar 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Konstanta sebesar 2,251 artinya jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dianggap konstan, maka besarnya nilai kualitas informasi keuangan adalah 2,251.

Koefisien regresi (β) sebesar 0,262 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas informasi keuangan sebesar 26,2%. Dengan asumsi variabel independent lainnya tetap (konstan).

C. Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Pengujian secara parsial yang kedua antara variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai koefisien regresi (β) untuk X adalah 0,262. Berdasarkan rumusan hipotesis terhadap pengujian secara parsial ditentukan bahwa jika $\beta_2 \neq 0$: H_0 ditolak dan menerima H_a artinya Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011) dengan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah di dinas Kota Bandung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan di Provinsi Sul-Sel.

B. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Instrumen dan daftar pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan mengadopsi item-item pernyataan dari penelitian sebelumnya dan dari literatur-literatur tinjauan kepustakaan pada bab II dalam penelitian ini sehingga dirasa masih banyak kelemahan-kelemahan.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada satu variabel yaitu SAP, padahal masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan kecilnya nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen).

C. Saran

Adapun saran untuk Provinsi Sul-Sel sebagai berikut:

1. Para penyusun laporan keuangan masing-masing memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda (tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi). Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi ditempatkan sebagai PPK dan staf pelaporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi.
2. Entitas akuntansi pada setiap kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel perlu mengimplementasikan SAP secara menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sugiono, Edy Untung. 2008. *Panduan Praktis Dasar Analisa Keuangan Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Perbankan, Grasindo (Gramediawidiasarana Indonesia)*. Jakarta.
- Astuti, T.P dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (Vol. 1 No. 1 Tahun 2016). Universitas Setia Budi Surakarta.
- Albugis, F.F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* (Vol. 4 No.3 September 2016). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Batubara, A H. 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisi Administrasi Dan Kebijakan*. Vol. 3 No. 1
- Basuki, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Gede, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Husain, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan, Syafitri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi Ke Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Intihanah & Nur Afifa Muthia S. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari).
- Indrawani. 2012. Prinsip good financial governance dalam pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan clean governance. (Vol: XVII No. 3 Tahun 2012). Universitas Airlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ludani, Melina Marcori, dkk. 2017. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Oktarina, Mia. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Dan Good Governance

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal Of Accounting* (Vol : 2 No. 2 Tahun 2016). Universitas Pandanaran Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, fokusmedia, Bandung.

Prantama, Noor Alyda, dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis* (Vol: 1 No. 2 Tahun 2015). Universitas Brawijaya.

Pramono Hariadi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jogjakarta.

Rondonuwu, R.H, dkk. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* (Vol. 3 No. 4 Desember 2015). Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ristanti, N.M.A, dkk. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1* (Vol: 2 No. 1 Tahun 2014). Universitas Pendidikan Ganesha.

S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.

Tua. S Manuppan Bangun, dkk. 2015. *Pengaruh Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai). *Jom FEKOM* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Ulum, I. MD. 2009. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Bumi Aksara.

Wiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Penerbit Gadja Mada University Press.

Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

A. Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel”**, dengan melakukan studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Identitas Responden

1. Nama :(Boleh dirahasiakan)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Pendidikan : S1 S3
 S2
4. Masa kerja : ≤ 5 tahun
 > 5 tahun

C. Petunjuk Pengisian

Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan. Setiap pernyataan disediakan alternatif yang sesuai dengan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara, dengan cara memberi tanda (✓).

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

K : Kurang Setuju

Kuesioner tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

No.	Pernyataan	Penilai				
		SS	S	KS	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Basis Akuntansi						
1	Penerapan basis akrual untuk pengakuan Aset dalam Neraca Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel.					
Nilai Historis						
2	Aset dicatat sesuai dengan nilai wajar dalam Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel.					
Substansi Mengungguli Bentuk Formal						
3	Menyajikan dengan wajar transaksi yang seharusnya disajikan, maka transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi					

	Sul-Sel.					
Periodisitas						
4	Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dilaporkan sesuai dengan periode pelaporan yang ditentukan.					
Pengungkapan Lengkap						
5	Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.					

Kuesioner tentang Kualitas Informasi Keuangan (Y)

No.	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Relevan						
1	Laporan keuangan dalam catatan Atas Laporan Keuangan disajikan dengan lengkap.					
2	Informasi laporan keuangan membantu pengguna dalam memprediksi kinerja keuangan di masa mendatang.					
Andal						
3	Informasi laporan keuangan disajikan secara jujur/wajar.					

Dapat dibandingkan					
4	Informasi keuangan disajikan oleh instansi/lembaga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				
Dapat dipahami					
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga dapat dipahami oleh penggunanya.				

Lampiran 2: Matriks Tabulasi Data

No.	Standar Akuntansi Pemerintahan					Total	Kualitas Informasi Keuangan					Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	X2	PY1.1	PY1.2	PY1.3	PY1.4	PY1.5	Y
1	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19
2	4	4	4	3	3	18	4	4	4	3	3	18
3	3	4	5	3	3	18	4	3	3	4	3	17
4	4	3	5	4	5	21	5	4	4	4	4	21
5	5	4	4	4	4	21	4	4	3	4	4	19
6	4	4	4	3	3	18	3	4	4	4	3	18
7	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	3	17
8	4	3	3	3	4	17	3	4	4	4	3	18
9	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
10	4	4	3	4	3	18	4	3	3	3	3	16
11	4	4	5	4	4	21	4	4	4	5	4	21
12	5	3	3	4	4	19	4	4	4	4	3	19
13	5	3	3	3	5	19	4	4	4	4	3	19
14	4	4	3	4	4	19	5	4	3	4	3	19
15	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	4	19
16	5	4	5	4	5	23	4	5	4	5	4	22
17	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	4	20
18	4	4	3	4	3	18	4	4	5	4	4	21
19	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
20	3	5	5	3	4	20	4	4	4	4	4	20
21	3	3	3	5	5	19	4	4	4	4	3	19
22	5	3	5	3	3	19	5	4	3	3	4	19
23	5	4	3	5	3	20	3	4	3	3	3	16

24	5	4	5	5	3	22	4	4	5	4	5	22
25	5	4	5	5	3	22	5	5	5	4	3	22
26	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	3	17
27	3	5	3	5	5	21	3	5	4	5	3	20
28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
29	4	4	3	4	4	19	4	4	3	4	4	19
30	5	5	4	4	4	22	4	4	5	4	5	22
31	3	5	5	3	3	19	4	3	3	5	3	18
32	3	4	3	3	3	16	5	3	3	3	3	17
33	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	24
34	4	5	5	5	4	23	5	4	5	4	5	23
35	4	4	4	4	4	20	5	4	4	3	4	20
36	4	4	4	4	4	20	4	3	4	5	3	19
37	5	3	5	3	5	21	3	4	3	4	3	17
38	5	4	4	5	4	22	4	5	4	4	4	21
39	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
40	4	3	4	3	4	18	3	4	3	3	5	18
41	3	3	3	3	4	16	3	4	3	3	3	16
42	4	4	4	4	4	20	5	4	4	3	4	20
43	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
44	5	4	3	4	4	20	4	3	4	5	4	20
45	5	3	3	3	3	17	3	4	3	3	4	17
46	4	5	3	5	3	20	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	21
48	4	3	4	4	3	18	3	4	4	4	4	19
49	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	24
50	4	3	4	5	3	19	4	4	4	3	3	18

Lampiran 3 : Olah Data SPSS

1. Validitas dan Releabilitas

Variabel X

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,677	,678	5

Inter-Item Correlation Matrix

	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.1	1,000	,139	,311	,401	,299
P2.2	,139	1,000	,357	,473	,388
P2.3	,311	,357	1,000	,207	,377
P2.4	,401	,473	,207	1,000	,319
P2.5	,291	,188	,277	,319	1,000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,868	3,740	4,080	,340	1,091	,016	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1.1	15,26	4,564	,419	,247	,631
P1.2	15,50	4,663	,426	,310	,629
P1.3	15,52	4,296	,413	,227	,636
P1.4	15,48	4,214	,513	,367	,601
P1.5	15,60	4,653	,388	,164	,644

Variabel Y**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items

,712	,714	5
------	------	---

Inter-Item Correlation Matrix

	PY1.1	PY1.2	PY1.3	PY1.4	PY1.5
PY1.1	1,000	,234	,373	,196	,317
PY1.2	,234	1,000	,437	,295	,301
PY1.3	,373	,437	1,000	,474	,464
PY1.4	,196	,295	,474	1,000	,298
PY1.5	,317	,295	,464	,247	1,000

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,804	3,620	3,960	,340	1,094	,017	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PY1.1	15,06	3,609	,386	,169	,699
PY1.2	15,14	3,756	,441	,214	,676
PY1.3	15,28	3,144	,652	,433	,601
PY1.4	15,20	3,551	,420	,235	,685
PY1.5	15,40	3,510	,467	,247	,665

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary^b

Mod	R	R	Adjusted R	Std. Error of	Change Statistics
-----	---	---	------------	---------------	-------------------

el		Square	Square	the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1		,936 ^a	,877	,872	,811	,877	67,499	2	47	,000

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,100	2	110,050	67,499	,000 ^b
	Residual	30,880	47	,657		
	Total	250,980	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,251	,928		2,426	,019
	X	,262	,085	,295	3,092	,003

Dependent Variable: Y

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian





BIOGRAFI



Patmawati, biasa dipanggil Patma. Lahir di Karang, Desa Latimojong, Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Januari 1995. Penulis adalah anak kedua dari 8 bersaudara, pasangan dai Bapak Sahir dan Ibu Junira.

Penulis Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar 186 Karang pada tahun 2002 sampai 2008, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satap 5 Baraka pada tahun 2008 sampai 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN Baraka pada tahun 2011 sampai 2014.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan selesai pada tahun 2018.

Karena keaktifannya selama mengenal dunia pendidikan maka penulis mulai memasuki organisasi Palang Merah Remaja (PMR) pada tahun 2012 di Man Baraka. Untuk memperoleh gelar sarjana sosial penulis menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Di Provinsi Sul-Sel”.